



# **RENSTRA**

(Rencana Strategis)  
KECAMATAN RANDUAGUNG  
TAHUN  
2024 – 2026

KECAMATAN RANDUAGUNG  
KABUPATEN LUMAJANG  
Jalan Raya Randuagung No.82 Telp.  
(0334) 323313

TAHUN 2023  
**LUMAJANG**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Randuagung Tahun 2024-2026 yang ditangani oleh Camat Randuagung Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Randuagung.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kecamatan Randuagung terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Kecamatan Randuagung dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, penutup, dan lampiran.

Rencana Strategis ini merupakan proses pembangunan 3 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Kecamatan Randuagung pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Randuagung terdahulu;
3. Cascading Kinerja Kecamatan Randuagung sebagai salah satu hasil review internal;
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan di Kabupaten Lumajang lebih terarah.

Randuagung, Mei 2023  
CAMAT  
  
ISKANDAR  
NIP. 19650905 199003 1 009



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	29
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	29
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	29
2.7. Kerjasama Perangkat Daerah.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2. Isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	37
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	72
5.1. Strategi Kecamatan Randuagung.....	72
5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Randuagung.....	73

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	87
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	119
7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.....	119
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah (uraian TC-28) .....	119
BAB VIII PENUTUP.....	124

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra.....	3
1.2 Gambar 1.2 Bagan Organisasi Kecamatan Randuagung.....	3

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung Berdasarkan Jabatan per Januari Tahun 2023.....	13
2.	Tabel. 2.2 Data Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung.....	13
3	Tabel 2.3 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2022.....	15
4.	Tabel 2.4. Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	3
5.	Tabel 2.5. Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung Berdasarkan Diklat Penjurangan Tahun 2022 .....	16
6.	Tabel 2.6. Inventris Barang Kantor Kecamatan Randuagung Tahun 2022.....	17
7.	Tabel 2.3.1 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Randuagung Kabupaten lumajang tahun 2019 s/d 2023.....	22
8.	Tabel 2.3.2 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s/d 2023.....	23
9.	Tabel 3.1 T.B.35 Masalah dan akar masalah Kecamatan Randuagung.....	38
10.	Tabel 4.1 – TC-25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Randuagung.....	49
11.	Tabel 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung.....	60
12.	Tabel 5.1 TC-26 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	90
13.	Tabel 6.1 TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.....	92
13.	Tabel 7.1 TC-28 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Kecamatan Randuagung Tahun 2024-2026.....	120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randuagung Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang menyatakan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Randuagung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif dan responsif gender sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Randuagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama tiga tahun maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan Renja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang

diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

#### 1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Randuagung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

#### 2. Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Renstra Kecamatan Randuagung Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Randuagung dalam penyelenggaraan pembangunan 3(tiga) tahun dan tahunan, disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Randuagung agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Randuagung diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
- 2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Kecamatan Randuagung
- 5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Randuagung

### BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah

### BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Randuagung

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

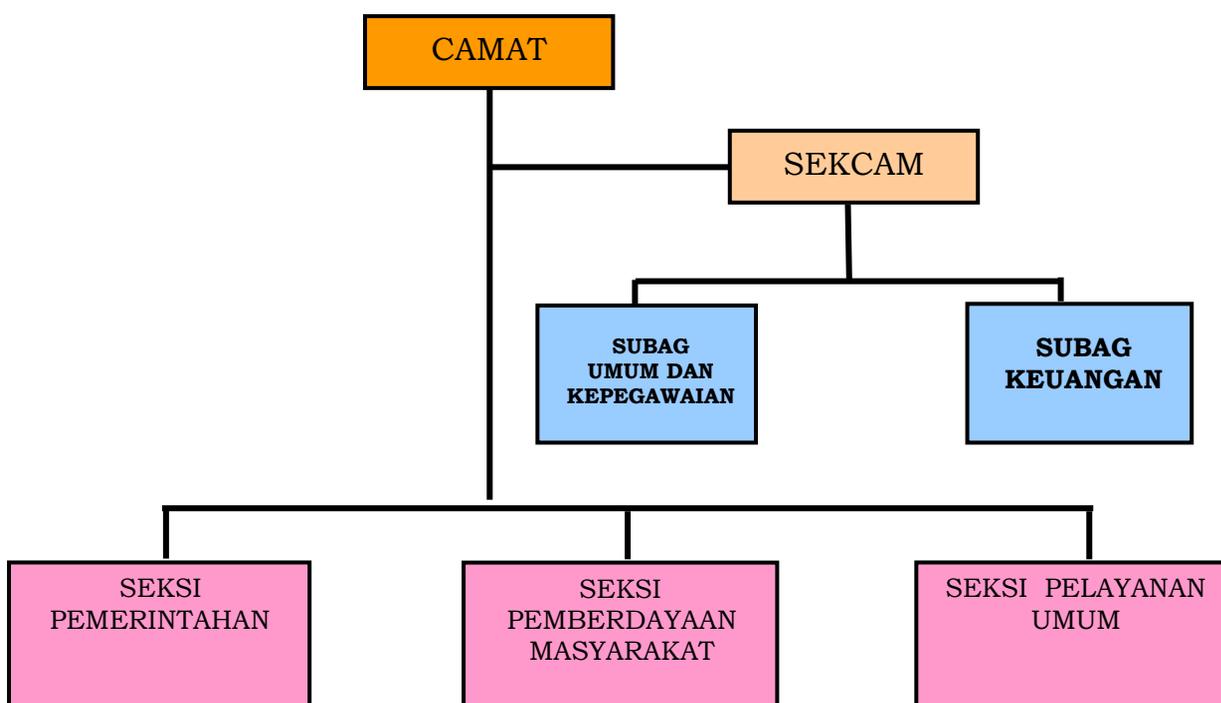
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Randuagung menggunakan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2019 yang terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1.2  
Bagan Organisasi Kecamatan Randuagung  
(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - 1) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
  - 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
  - 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
  - 5) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
  - 6) Melakukan administrasi kepegawaian;

- 7) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik Negara;
  - 8) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  - 9) Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - 10) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
  - 11) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - 12) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - 4) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
  - 5) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
  - 6) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
  - 7) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
  - 8) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
  - 9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - 11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
- 3) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;

- 4) Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 6) Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 9) Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- 10) Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 12) Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 13) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- 14) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- 15) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- 16) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pilkades;
- 17) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- 18) Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 19) Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 20) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 21) Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- 22) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- 23) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- 24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan Pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;

5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

#### 1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Randuagung ada 7 jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung  
Berdasarkan Jabatan per April Tahun 2023

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	ISKANDAR	L	Camat
2.	HARMINTO,SH	L	Sekretaris Kecamatan
3.	HASAN BASRI,Spd	L	Kasi. Pemerintahan
4.	EKO MARSUDI,Spd	L	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
5.	URSILA NURWAHYUNI	L	Kasi. Pelayanan Umum
6.	HASAN BASRI,Spd	L	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
7.	M.SAMADONA	L	Kasubag. Keuangan

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 30 April 2023*

2) Berdasarkan Pegawai

Tabel. 2.2

Data Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	ISKANDAR	Camat	✓	
2.	HARMINTO,SH	Sekretaris Kecamatan	✓	
3.	MOCHAMMADCHAIDIR SHOLEH,S.STP	Kasi. Pemerintahan	✓	
4.	EKO MARSUDI, S.Pd	Kasi PMD	✓	
5.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi. Pelayanan Umum		✓
6.	MOCH.JAMA'AH DONA	Kasubbag. Keuangan	✓	
7.	HASAN BASRI, SH	Kasubbag Kepegawaian		✓
8.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional Umum	✓	
9.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional Umum		
10.	UMAR FARUQ	Staf Fungsional Umum	✓	
11.	M.RUSDI	Staf Fungsional Umum	✓	
12.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	✓	
13.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak		✓
14.	Viantu Sekki	Tenaga Kontrak	✓	
15.	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak		✓
16.	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak		✓
17.	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak	✓	
18.	RIRIN SUMARNI WULANDARI	Tenaga Kontrak		✓

3) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 12 (dua belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Randuagung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah	L	P
1	Pembina ( IV/a )	2 orang	2	
2	Penata Tk I ( III/d )	2 orang	2	
3	Penata ( III/c )	6 orang	5	1

4	Penata Muda TK I ( III/b )	- orang		
5	Penata Muda (III/a)	- orang		
6	Pengatur Tk I (II/d)	3 orang	3	
7	Tenaga Kontrak	8 orang	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 30 April 2023.*

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Sarjana ( S-1/D-IV )	6	-	6 orang
2.	Sarjana Muda ( D-III )	-	-	0 orang
3.	D-I / D-II	-	-	- orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	5	1	6 orang
Jumlah		11	1	12 orang

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 30 April 2023.*

5) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.5.  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung  
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	0	-	0 orang
2.	Diklat Pim IV	5	-	5 orang
Jumlah		5	0	5 orang

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 30 April 2023.*

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Randuagung memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6.  
 Inventris Barang Kantor  
 Kecamatan Randuagung Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga
11.	Tanah	1 bidang	1.548.842.400
22.	Peralatan dan Mesin	457 Buah/set	4.009.197.451
33.	Gedung dan Bangunan	5 buah	1.567.812.000
44.	Jaringan	-	
55.	Aset Tetap Lainnya	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>462</b>	<b>7.125.851.851</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kecamatan Randuagung berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Randuagung berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Randuagung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

TABEL 2.3.1 T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Randuagung  
Kabupaten lumajang tahun 2019 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					201 9	20 20	20 21	202 2	2023	201 9	20 20	202 1	202 2	2023	2019	20 20	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>2019 - 2020</b>															78				
<b>1</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>83, 55</b>	<b>84</b>	<b>N/ A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>83, 55</b>	<b>84</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>10 0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>2</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>72 %</b>	<b>76 %</b>	<b>N/ A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>75 %</b>	<b>76 %</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>104</b>	<b>10 0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	N/A	N/A	-	79	80	N/A	N/A	N/A	79	79	N/A	N/A	N/A	<b>100</b>	<b>99</b>	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A		75	75	N/A	N/A	N/A	75	75	N/A	N/A	N/A	<b>100</b>	<b>10 0</b>	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	<b>100</b>	<b>10 0</b>	N/A	N/A	N/A
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A		75	75	N/A	N/A	N/A	75	75	N/A	N/A	N/A	<b>100</b>	<b>10 0</b>	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu</b>	N/A	N/A	-	80	81	N/A	N/A	N/A	80	81	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Desa Tertib Administrasi	N/A	N/A		75	75	N/A	N/A	N/A	75	75	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>																			
1	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	N/A	N/A	-	N/A	N/A	88	N/A	N/A	N/A	N/A	80,99	N/A	N/A	N/A	N/A	92,03	N/A	N/A
2	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	N/A	N/A		N/A	N/A	77	N/A	N/A	N/A	N/A	77	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
<b>2</b>	<b>rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>82</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>82</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>2022 - 2023</b>																			
2	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	91,33	93,33	N/A	N/A	N/A	87,3	30	N/A	N/A	N/A	96	32
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A	100	30	N/A	N/A	N/A	100	30
	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	91,56	N/A	N/A	N/A	87,5	25	N/A	N/A	N/A	87,5	27
	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A	100	40	N/A	N/A	N/A	100	40
2	<b>rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu</b>	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	88,33	94,44	N/A	N/A	N/A	88,33	0,83	N/A	N/A	N/A	100	0,88

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	83	83,00	N/A	N/A	N/A	83	0,83	N/A	N/A	N/A	100	1,00
	Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100,00	N/A	N/A	N/A	100	0,83	N/A	N/A	N/A	100	0,83
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	83	83,00	N/A	N/A	N/A	83	0,83	N/A	N/A	N/A	100	1,00

Tabel 2.3.2  
TABEL T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Randuagung  
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s/d 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>2019-2020</b>																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	324.038.000	279.616.600				278.581.421	268.857.128			N/A	0,86	0,96				(13,71)	(3,49)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	262.652.000	50.895.000				255.725.590	49.566.300			N/A	0,97	0,97				(80,62)	(80,62)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	10.748.000	5.291.000				10.748.000	5.291.000			N/A	1,00	1,00				(50,77)	(50,77)

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANG AN																	
PROGRA M PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN KECAMAT AN	650.56 2.000	388.80 5.000				650.562 .000	388.805 .000			N/A	1,0 0	1,0 0				(40,24)	(40,24)
<b>2021</b>																	
PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN / KOTA			1.400.7 55.057					1.377.06 4.696					98%				
PROGRA M PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN			41.066. 000					41.066.0 00					100%				

PUBLIK																		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.895.000					5.895.000					100%					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.800.000					1.800.000					100%					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			295.209.000					292.809.000					99%					
<b>2022-2023</b>																		
PROGRAM PENUNJA			1.400.755.057	1.574.801.636	1.624.789.489			1.377.064.696	1.537.874.152	354.928.797			0,98	0,98	-	169,1%	-	234,5%

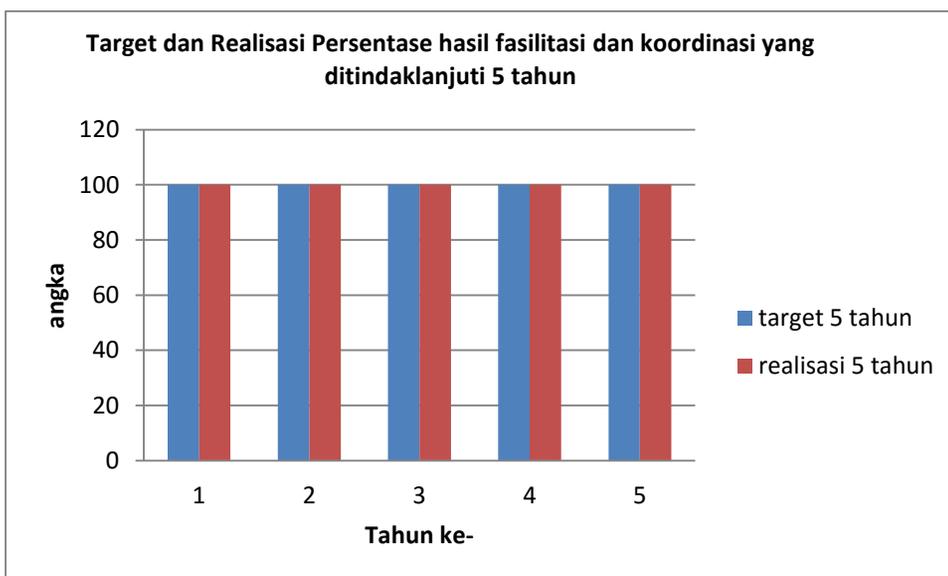
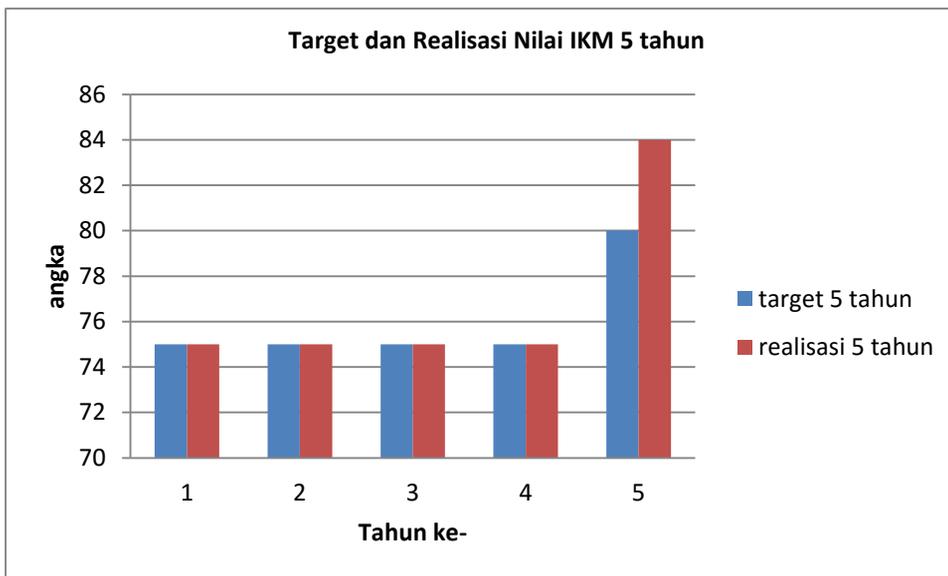
NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN / KOTA																	
PROGRA M PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK			41.066. 000	-	9.000.0 00			41.066.0 00	-	-			1,00	-		0,0%	N/A
PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN			20.071. 000	28.305. 000	170.694 .500			20.071.0 00	28.305. 000	2.700.0 00			1,00	1,0 0		0,0%	0,0%
PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM			-		16.650. 000				-				-	-		N/A	N/A

PROGRA M PENYELE NGGARAA N URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM			-	2.400.0 00	2.400.0 00			1.800.00 0,00	2.400.0 00,00	600.00 0			-	1,0 0		N/A	N/A
PROGRA M PEMBINA AN DAN PENGAW ASAN PEMERIN TAHAN DESA			295.209 .000	280.800 .000	295.200 .000			295.209. 000	280.800 .000	25.200. 000			1,00	1,0 0		0,0%	0,0%
	1.248. 000.00 0	724.60 7.600	3.501.8 26.114	1.886.3 06.636	2.118.7 33.989	1.195.6 17.011	712.519 .428	3.453.84 5.392	1.849.3 79.152	383.42 8.797	3,8 3	3,9 4	9	4	-	- 187	- 177

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Tabel T. C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang periode tahun 2019-2023,
  - a. indicator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target:
  - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target.
  - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata melebihi target.

Gambaran diatas kami sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



2. Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung Periode tahun 2019 – 2023, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai dalam tabel T. C.24 diatas.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung meliputi :

1. internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS dan Tenaga Upah Bulanan,
2. Forkopimca (Camat, Koramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sector yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT BP Pertanian, KUA, Perhutani, Polhut, dan
4. Desa se-Kecamatan Randuagung yaitu Desa Randuagung, Jambekumbu, Jambearum, Kertosari, Pagowan, Karangnom, Sukorejo.
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan.

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Randuagung serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

- a. Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Randuagung meliputi :
  - a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan Masyarakat di wilayah
  - b) Desa se-Kecamatan Randuagung dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
- b. Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Randuagung meliputi :
  - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mitra kerja dalam hal layanan Penerbitan Akta Kelahiran Tuntas Di Kecamatan, Penerbitan Akta Kematian Tuntas Di Kecamatan, Penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan, Perekaman dan Pencetakan KTP-el Tuntas Di Kecamatan, Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas Di Kecamatan, Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI), Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas Di Desa.
  - c) Kepala Bagian Kesra Mitra Kerja dalam hal hasil tindaklanjut Fasilitasi Pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu Dan Organisasi Sosial, Fasilitasi Pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial Dan Pribadatan,
  - d) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Mitra Kerja dalam hal tindaklanjut hasil pengajuan santunan Kematian di Kecamatan.

## 2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kecamatan Randuagung sejak di tetapkannya belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana selama ini menggunakan jasa swadaya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

## 2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Kerjasama Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	NO KONTRAK	NAMA PENYEDIA	KET
<b>TAHUN 2019</b>				
1	Belanja Alat Tulis Kantor	027/01/PPK/427.96/2019	MINARNI ABADINIK / TOKO AMINAH	
2	Belanja Modal alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Meubelair, Belanja Modal Home Use	027/09/PPK/427.96/2019	BUDI HARTONO / CV. AA JAYA	
3	Belanja Modal Office Use, Belanja Modal Meubelair, Belanja modal Alat Pembersih, Belanja Modal Home Use, Belanja Modal Personal Komputer, dan belanja modal peralatan personal komputer	027/13/PPK/427.96/2019	SUTIMAN/ CV. CITRA JAYA ABADI	
4	Belanja Bahan Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	027/011/PPK/427.96/2019	BUDI HARTONO / CV. AA JAYA	
5	Belanja Pakaian Kegiatan Tertentu	027/021/PPK/427.96/2019	LINDYAH SUSILO WARDANI / CV. MANDA GROUP	
6	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tertentu	027/025/PPK/427.96/2019	LINDYAH SUSILO WARDANI / PT. MANDA CAKRAWALA SEMERU	
7	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Tempat Parkir	602.1/66/427.96/2019	WAHYU SUPRIYANTI / CV. KARYA NYATA	

<b>NO</b>	<b>NAMA PEKERJAAN</b>	<b>NO KONTRAK</b>	<b>NAMA PENYEDIA</b>	<b>KET</b>
8	Belanja modal alat penyimpanan, perlengkapan kantor, belanja modal meubelair, belanja modal alat pendingin, belanja modal peralatan personal komputer, dan belanja modal kursi kerja pejabat	027/079/PPK/427.96/2019	BUDI HARTONO / CV. AA JAYA	
<b>TAHUN 2020</b>				
1	Belanja Alat Tulis Kantor	027/32/PPK/427.96/2020	MINARNI ABADINIK / TOKO AMINAH	
2	Belanja modal Peralatan Kantor	027/303/PPK/427.96/2020	BUDI HARTONO / CV. AA JAYA	
3	Belanja Pembangunan Rehab Rumah Dinas	602.1/481/427.96/2020	RISMA FAUZIAH/ CV. PURNAMA INDAH	
<b>TAHUN 2021</b>				
1	Belanja Alat Tulis Kantor	602.1/25/427.96/2021	MINARNI ABADINIK / TOKO AMINAH	
<b>TAHUN 2022</b>				
1	Belanja Alat Tulis Kantor	602.1/149/427.91/2022 ,	MINARNI ABADINIK / TOKO AMINAH	
2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Randuagung	602.1/1333/427.91/2022	RISMA FAUZIAH/ CV. PURNAMA INDAH	

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai yaitu Mengoptimalkan Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *cultureset*.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat pembangunan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan *IoT* (*internet of thing*). Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau *online*. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat

memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan hemat di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Reformasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan melalui dukungan *e-government* yang terintegrasi.

Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya Inovasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan strategi sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas camat yaitu melakukan Koordinasi bidang pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

Berdasarkan Permedagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolak

ukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada table.T.B.35 sebagai berikut :

Tabel 3.1 T.B.35

## Masalah dan akar masalah Kecamatan Randuagung

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
	Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai	Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang
		Luasan ruang layanan yang belum memadai
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Kurangnya Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa

### 3.2 Isu Strategis

#### 1. Isu strategis Kecamatan Randuagung

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencangkup jangka pendek dan jamgka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan

selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Randuagung, perumusan isu strategis Kecamatan Randuagung dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
-1	-2	-3
Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai		Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang
		Luasan ruang layanan yang belum memadai
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa		Kurangnya Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang 2024-2026, dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Randuagung perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Randuagung, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah
  - 1) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
  - 2) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolok ukur (indikator) keberhasilan, tolok ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai berikut :

Tabel 4.1 – TC-25

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor  
Kecamatan Randuagung**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	62(B-)	64(B-)	66(B-)
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Kordinasi yag ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	78	84,31	88,89
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Persen	Jumlah Desa yag Menyusun RKPDesa tepat waktu+Jumlah Desa yag Menyusun APBDesa tepat waktu +Jumlah Desa yag menyusunLPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah Seluruh Desa di Wlayah Kecamatan dikali 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan desa dikali 100	83	89	92

Dalam hal penentuan sasaran perlu adanya penjelasan konkrit agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran sasaran, berjelasan dari sasaran dan Indikatornya sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa  
 Indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu  
 Formulasi :

Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu +Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan kali 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikali 100

Penjelasan :

- Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.
  1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.

2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

b. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

Formulasi :

Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100

Penjelasan :

Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.

## 1.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama.

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung yang mana memuat Tujuan, sasaran, Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indicator pada masing-masing sebagaimana terjasaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Unsur Kewilayahan				
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan dikali 100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan perangkat daerah yang Dipenuhi dibagi Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan perangkat daerah yang direncanakan dikali 100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tepenuhnya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	<i>Persen</i>	Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dipenuhi di bagi jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Persen	Jumlah Fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi/Jumlah Fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan x 100
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi/Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD	<i>Persen</i>	Jumlah barang milik daerah yang dipenuhi dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan kali 100
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>Unit</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>Unit</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah</b>	Persen	Jumlah Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi dibagi jumlah Fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan dikali 100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan BMD</b>	Persen	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah barang milik daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN Yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100
Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dibanding Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>laporan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	<i>Persen</i>	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk kecamatan) dibagi 2
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	<i>Persen</i>	jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Lembaga Kemasyarakatan</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Dokumen</i>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<i>Persen</i>	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	<i>Keluarga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<i>Keluarga</i>	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	<i>Keluarga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	<i>Keluarga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Keluarga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100
Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Fasilitas</i>	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<i>Fasilitas</i>	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Orang</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Dokumen</i>	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100
Meningkatnya Rata-Rata Persentasi Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi Jumlahfasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di rencanakan dikali 100
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
12	13	14	15	16
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Kecamatan Randuagung

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode tiga tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan Randuagung meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b. Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- c. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa

## 5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Randuagung

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Randuagung juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Randuagung selama 3 (tiga) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditentukan diatas. Adapun arah kebijakan untuk mencapai strategi yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan\Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Kependudukan
3. Melakukan Rahabilitasi ruang layanan agar memadai
4. Meningkatkan Fasilitas tata kelola pemerintahan desa;

Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan sudah terurai diatas hal ini dapat dilihat secara terperinci yang mana arah strategi dan kebijakan sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Randuagung, hal ini dapat dilihat dari Tabel TC-26 sebagai berikut :

Tabel 5.1 TC-26

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan memperhatikan konsistensi penjabaran program dan kegiatan serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		Mengoptimalkan Proses Perencanaan pembangunan Desa	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan perangkat daerah, pengelolaan barang milik perangkat daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
		Meningkatkan transparansi pemerintahan	
		Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
		Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Meningkatkan kondusifitas daerah melalui peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatkan upaya penanganan konflik sosial	

	Meningkatkan pengarusutamaan gender dengan cara meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana
		Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan cara peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kemitraan desa dengan stakeholder terkait	Revitalisasi lembaga kemasyarakatan desa
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Randuagung selama 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Randuagung adalah tersaji pada table TC-27. sebagaimana berikut :

TABEL 6.1 TC-27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Unsur Kewilayahan							1,916,486,189		2,351,113,139		2,254,684,419		6,522,283,747	
7.01.01	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100	100	1,699,465,689	100	2,004,223,639	100	1,938,094,919	100	5,641,784,247	
7.01.01.201	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Dipenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan dikali 100	100	100	14,000,000	100	15,500,000	100	15,500,000	100	45,000,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.2 01.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	4,000,000	3	4,000,000	2	4,000,000	7	12,000,000	
7.01.01.2 01.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5,000,000	1	5,500,000	1	5,500,000	3	16,000,000	
7.01.01.2 01.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2		-	2	2,000,000	2	2,000,000	4	4,000,000	
7.01.01.2 01.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	3,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	15	7,000,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.2 01.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	8	2,000,000	8	2,000,000	8	2,000,000	24	6,000,000	
7.01.01.2 02	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan perangkat daerah yang Dipenuhi dibagi Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan perangkat daerah yang direncanakan dikali 100%	100	100	1,298,960,839	100	1,303,960,839	100	1,303,960,839	100	3,906,882,517	
7.01.01.2 02.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	11	1,267,300,839	11	1,267,300,839	11	1,267,300,839	11	3,801,902,517	
7.01.01.2 02.2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	24,660,000	12	24,660,000	12	24,660,000	36	73,980,000	
7.01.01.2 02.4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		-	12	3,000,000	12	3,000,000	24	6,000,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.2 02.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	4,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	3	10,000,000	
7.01.01.2 02.6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2		-	2	2,000,000	2	2,000,000	4	4,000,000	
7.01.01.2 02.7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	3,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	36	11,000,000	
7.01.01.2 03	Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dipenuhi di bagi jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	2,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	10,000,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.2 03.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	6	6,000,000	
7.01.01.2 03.6	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		-	12	2,000,000	12	2,000,000	24	4,000,000	
205	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepagawaian PD	Persen	Jumlah Fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi/Jumlah Fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan x 100	100	100	-	100	9,600,000	100	11,200,000	100	20,800,000	
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	-	1	9,600,000	1	11,200,000	3	20,800,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.206	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x100	100	100	69,846,850	100	102,280,000	100	102,280,000	100	274,406,850	
7.01.01.206.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	1	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	3	12,000,000	
7.01.01.206.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	3	21,988,850	3	30,000,000	3	30,000,000	9	81,988,850	
7.01.01.206.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	10,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000	12	34,000,000	
7.01.01.206.7	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1,788,000	1	2,160,000	1	2,160,000	3	6,108,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.206.8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	5,040,000	12	6,000,000	12	6,000,000	36	17,040,000	
7.01.01.206.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	27,030,000	12	48,120,000	12	48,120,000	36	123,270,000	
7.01.01.207	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD	Persen	Jumlah barang milik daerah yang dipenuhi dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan kali 100	100	100	66,500,000	100	207,500,000	100	122,800,000	100	396,800,000	
7.01.01.207.2	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3		-	2	62,000,000	2	62,000,000	4	124,000,000	
7.01.01.207.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	10	66,500,000	9	145,500,000	3	60,800,000	22	272,800,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.01.208	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah</b>	Persen	Jumlah Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi dibagi jumlah Fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	187,668,000	100	206,332,800	100	222,904,080	100	616,904,880	
7.01.01.208.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		-	12	3,600,000	12	3,600,000	24	7,200,000	
7.01.01.208.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	37,020,000	12	37,020,000	12	37,020,000	36	111,060,000	
7.01.01.208.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	150,648,000	12	165,712,800	12	182,284,080	36	498,644,880	
7.01.01.209	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan BMD</b>	Persen	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah barang milik daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali	100	100	60,490,000	100	155,050,000	100	155,450,000	100	370,990,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					100										
7.01.01.2 09.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	34,400,000	7	34,800,000	9	35,200,000	21	104,400,000	
7.01.01.2 09.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	20	13,200,000	33	20,250,000	33	20,250,000	86	53,700,000	
7.01.01.2 09.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2	12,890,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	212,890,000	
7.01.02	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN Yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	100	100	2,700,000	100	17,700,000	100	17,700,000	100	38,100,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.02.201	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100	100	100	-	100	12,960,000	100	12,960,000	100	25,920,000	
7.01.02.201.2	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1		-	12	12,960,000	12	12,960,000	24	25,920,000	
7.01.02.204	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dibanding Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100	100	100	2,700,000	100	4,740,000	100	4,740,000	100	12,180,000	
7.01.02.204.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	16	2,700,000	16	4,740,000	16	4,740,000	48	12,180,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.03	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk kecamatan) dibagi 2	100	100	155,395,500	100	170,109,500	100	170,109,500	100	495,614,500	
7.01.03.201	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100	100 %	124,915,500	100 %	131,920,000	100 %	131,920,000	100	388,755,500	
7.01.03.201.1	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 unsur	6	2,700,000	6	2,700,000	6	2,700,000	18	8,100,000	
7.01.03.201.2	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	6,600,000	1	6,600,000	1	6,600,000	3	19,800,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Kecamatan													
7.01.03.2 01.3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	7	115,615,500	8	122,620,000	8	122,620,000	23	360,855,500	
7.01.03.2 06	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100	100	100	30,480,000	100	38,189,500	100	38,189,500	100	106,859,000	
7.01.03.2 06.3	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	84	80	6,000,000	80	6,000,000	80	6,000,000	240	18,000,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.03.2 06.7	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- keluarga	-	86	1,290,000	86	1,290,000	172	2,580,000		
7.01.03.2 06.8	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	- keluarga	-	20	5,250,000	20	5,250,000	40	10,500,000		
7.01.03.2 06.11	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	- keluarga	-	46	1,169,500	46	1,169,500	92	2,339,000		
7.01.03.2 06.12	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- keluarga	84	24,480,000	84	24,480,000	84	24,480,000	252	73,440,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.04	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	100	100	9,125,000	100	23,720,000	100	21,370,000	100	54,215,000	
7.01.04.2 01	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Fasilitas</i>	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1	2	9,125,000	2	23,720,000	2	21,370,000	6	54,215,000	
7.01.04.2 01.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A	1	5,525,000	1	8,220,000	1	5,870,000	3	19,615,000	
7.01.04.2 01.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	2	3,600,000	2	15,500,000	2	15,500,000	6	34,600,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.05	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100	100	100	7,200,000	100	22,450,000	100	22,450,000	100	52,100,000	
7.01.05.201	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1	2	7,200,000	2	22,450,000	2	22,450,000	6	52,100,000	
7.01.05.201.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	100		-	100	15,250,000	100	15,250,000	200	30,500,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7.01.05.201.8	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,200,000	36	21,600,000	
7.01.06	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	100	83.33%		91.67%		91.67%		92%		
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	100	83.33%	42,600,000	83.33%	112,910,000	83.33%	84,960,000	83.33%	240,470,000	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	100	83.33%		91.67%		100%		100%		
7.01.06.201	Meningkatnya Rata-Rata Persentasi Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	Jumlah fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	100	42,600,000	100	112,910,000	100	84,960,000	100	240,470,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Tepat Waktu</b>				<b>dibagi Jumlahfasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di rencanakan dikali 100</b>										
7.01.06.2 01.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	3	3,000,000	3	9,000,000	4	10,800,000	10	22,800,000	
7.01.06.2 01.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	24,300,000	12	60,480,000	12	60,480,000	36	145,260,000	
7.01.06.2 01.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2		-	12	9,000,000	12	9,000,000	24	18,000,000	
7.01.06.2 01.6	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A	-	-	1	29,750,000	-	-	1	29,750,000	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.01.06.201.7	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	6,300,000	1	1,080,000	1	1,080,000	3	8,460,000	
7.01.06.201.8	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1		-	1	1,800,000	1	1,800,000	2	3,600,000	
7.01.06.201.11	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	9,000,000	1	1,800,000	1	1,800,000	3	12,600,000	

Dari tabel diatas merupakan rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai selama 3 tahun oleh kecamatan Randuagung yang sudah sesuai dengan pagu indikatif dari Kabupaten Lumajang.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026**

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Randuagung bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa

#### **7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah**

Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Randuagung yang akan di capai 3 (tiga) tahun 2024-2026 tercantum pada tabel TC-28, sebagai berikut :

Tabel 7.1 TC-28  
Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Kecamatan Randuagung  
Tahun 2024-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TUJUAN								
	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	-	62(B-)	64(B-)	66(B-)	66
	SASARAN								
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	100%	78%	84%	89%	89%
	PROGRAM								

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN Yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk kecamatan) dibagi 2	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu +Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan kali 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikali 100	83%	83%	89%	92%	92%
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	83%	83%	89%	92%	92%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Jumlah desa yang menetapkan APBDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	83%	83%	89%	92%	92%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		Jumlah desa yang menetapkan LPPDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100	83%	83%	89%	92%	92%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Randuagung tahun 2024-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan RPD Kabupaten Lumajang, untuk pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Randuagung.

Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan tiga tahunan kantor kecamatan Randuagung. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Randuagung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Randuagung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di kantor Kecamatan Randuagung yang merupakan *break down* dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Randuagung, Mei 2023  
CAMAT  
  
ISKANDAR  
NIP. 19650905 199003 1 009

